# ABSTRAK

***Yupi Mutiara Insani, 1203030131, 2025: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Potensi Penerapan Konsep Hybrid E-Voting Pada Pemilihan Umum di Indonesia***

Pemilihan Umum merupakan sarana utama demokrasi yang memungkinkan rakyat mengekspresikan kedaulatannya melalui pemilihan wakil dan pemimpin. Sistem pemilu konvensional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya, potensi kecurangan, dan kurangnya efisiensi. *Hybrid e-voting* kombinasi metode konvensional dan elektronik menjadi alternatif potensial untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. Sejak 2013, penerapan e-voting pada 1.700 desa di Indonesia telah menunjukkan hasil positif dalam pemilihan kepala desa, meskipun masih berskala kecil.

Tujuan Penelitian 1) Mengidentifikasi dan menganalisis konsep *Hybrid E-Voting* serta cara penerapannya dalam pemilu di Indonesia 2) Mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Hybrid E-Voting* di Indonesia 3) Menganalisis penerapan *Hybrid E-Voting* dari perspektif siyasah dusturiyah.

Teori demokrasi menitikberatkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Teori pemilu menelaah mekanisme pemilihan wakil rakyat secara adil, termasuk adaptasi teknologi seperti *hybrid e-voting* untuk mengatasi tantangan pemilu. Pada Siyasah Dusturiyah, implementasi *hybrid e-voting* harus menjalankan prinsip keadilan (al-'adl) dan Maqashid Syari'ah.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Metode penelitian kualitatif yang terdiri atas sumber data primer dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, observasi, wawancara dan studi dokumentasi serta teknik pengumpulan data ini disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menggambarkan sebagai berikut: 1) Penerapan *hybrid e-voting* di Indonesia memiliki peluang besar atas memajukan efisiensi dan transparansi pemilu. Sistem ini telah berhasil diterapkan dalam skala terbatas pada 1.700 desa untuk pemilihan kepala desa, meskipun belum diimplementasikan secara luas karena berbagai kendala teknis dan regulasi. 2) Terdapat kendala utama dalam penerapan *hybrid e-voting*, seperti kurangnya regulasi yang spesifik dan komprehensif, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, serta rendahnya literasi teknologi masyarakat yang memengaruhi penerimaan terhadap sistem ini. 3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penerapan *hybrid e-voting* telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-adl) dan Maqashid Syari'ah. Dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, *hybrid e-voting* dapat mendukung pemilu yang lebih transparan, inklusif, dan adil, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Indonesia.


*Kata Kunci: Hybrid e-voting, Siyasah Dusturiyah, Pemilu, Keadilan, Partisipasi.*